



Kalbar Butuh Tenaga Pendamping Dana Desa 160 Orang Sudah Ada Kades Tersangkut Hukum

PONTIANAK-RK. Digelar Dialog Terbuka Penetapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa di Pontianak Convationtion Center (PCC), Kamis (13/10). Salah seorang pembicaranya Anggota Komisi XI DPRD RI Ir. Michael Jeno MM.

"Dari diskusi kita ada beberapa hal yang implementasinya di lapangan masih belum optimal. Karena regulasi di pusat, sehingga proses penyalurannya lambat. Kebutuhan tenaga kerja pendamping aparat desa di lapangan untuk memanfaatkan dana desa (DD) ini," ujar Jeno dalam dialog tersebut.

Menurutnya, pendamping desa memang sangat dibutuhkan dalam mengimplemen- mentasikan dana yang sudah disalurkan agar tidak terjadi kebocoran anggaran atau disalahgunakan. Pendamping desa sangat berperan penting dalam hal pengawasan,

monev serta memberikan pemahaman penggunaan dana tersebut.

"Itu perlu keahlian teknis sehingga perlu pendamping desa yang latar belakangnya teknis. Tapi ternyata tenaga kerja pendamping desa yang dibutuhkan hampir 160 orang, namun yang tersedia tidak ada. Ini karena yang melamar tidak ada yang latar belakang teknis, ini menjadi kendala padahal ini sangat penting di lapangan," terangnya.

Program DD saat ini sudah berjalan di tahun kedua. Pihaknya sudah mengevaluasi di tahun sebelumnya. Banyak aspirasi masyarakat khususnya pengguna DD tidak tahu dan paham, ditambah lagi tidak ada tenaga pendamping desa.

"Saya sengaja mengajak BPK RI ke Pontianak, agar bisa menuntaskan persoalan

ini dan bisa mengambil langkah menyikapi perencanaan dan pelaporan hasil penggunaan DD ini sesuai dengan petunjuk teknis agar tidak menyala aturan yang ada," katanya.

Menurut informasi yang diterimanya, di Kalbar sudah ada kepala desa yang tersangkut hukum terkait DD ini. Hanya saja ia enggan membeberkannya. Sisi lainnya ia minta agar pihak terkait khususnya BPK RI memberikan regulasi atau kepastian terhadap aparat desa agar menempatkan pendamping di setiap desa.

"Kita minta BPK dan BPKP untuk membantu para Kades untuk membuat laporan sampai tuntas yang siklusnya dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke pelaporan tuntas," imbuh Politikus PDIP ini.

Di tempat sama, Anggota VI BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar MBA menyatakan, pihaknya mengawasi realisasi penggabungan keuangan negara termasuk DD yang inklud lapornya masuk ke kepala daerah. Dikatakannya sejauh ini secara nasional masih belum ada kendala yang berarti. Hanya saja, dia mengaku memang sudah ada yang terlibat dengan hukum lantaran melewatkan DD tersebut.

"Konstruksi keuangan negara di nawacita, turun ke desa yang jumlahnya sangat signifikan. Jadi ini sangat penting, karena pemerintah akan membuat pertumbuhan di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPK sekarang paralel bersama pemerintah untuk mengingatkan bahwa ini uang negara, harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Ada beberapa kasus

tapi tidak signifikan atau sekitar 0,1 persen saja," ucapnya.

Lantaran program ini baru berjalan di tahun kedua, banyak hal yang harus dibenahi termasuk apa yang menjadi keluhan pengguna dana tersebut. Tujuan akhirnya memberikan pelaporan yang riil atau sesuai dengan kondisi pembelanjaan keuangan DD yang disalurkan.

"Sekarang ini peraturan pemerintah dalam DD wajib mengisi laporan. Sehingga BPK menjaga mereka dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara secara akuntable, transparan yang diperiksa bersamaan dengan laporan keuangan pemerintah daerah," demikian Bahrullah.

Laporan: Gusnadi
Editor: Arman Hairadi